

Historis Perkembangan Pesantren, Madrasah, dan Sekolah di Indonesia dan Model Integrasi Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi dengan Pesantren

History of the Development of Islamic Boarding Schools (Pesantren), Madrasahs, and Schools in Indonesia, and Models of Integration of Schools/Madrasahs and Higher Education Institutions with Pesantren

Rozaq Shohibul Ichsan¹, Zulfatul Mufidah²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 September 2026

Revised 05 September 2026

Accepted 7 September 2026

Available online 09 September 2026

Keywords

Pesantren, Madrasah, Islamic School, Integration Model, Islamic Education in Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the historical development of Islamic educational institutions in Indonesia, including pesantren (Islamic boarding schools), madrasah, and formal schools, along with integration models between schools/madrasah and universities with pesantren. Using a historical-descriptive approach through library research methodology, this study traces the historical roots of pesantren as the oldest Islamic educational institution in the Nusantara archipelago, the transformation of madrasah from Islamic boarding schools into nationally standardized formal institutions, and the dynamics of general schools within Islamic contexts. The findings indicate that all three institutions have undergone significant transformation, particularly following the enactment of the National Education System Law No. 20 of 2003 and the Pesantren Law No. 18 of 2019. Integration models that have emerged include: (1) campus pesantren model (ma'had al-jami'ah), (2) integrated madrasah based on pesantren, (3) Islamic boarding schools, and (4) higher education institutions based on Islamic boarding schools. These integrations reflect efforts to address the challenges of modernity while maintaining Islamic values and local wisdom.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan historis lembaga pendidikan Islam di Indonesia, meliputi pesantren, madrasah, dan sekolah, serta model-model integrasi antara sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dengan pesantren. Menggunakan pendekatan historis-deskriptif dengan metode library research, kajian ini menelusuri akar sejarah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, transformasi madrasah dari pondok pesantren hingga menjadi lembaga formal berstandar nasional, serta dinamika pendidikan sekolah umum dalam konteks keislaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut mengalami transformasi signifikan, terutama pasca lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. Model integrasi yang berkembang meliputi: (1) model pesantren kampus (ma'had al-jami'ah), (2) madrasah terpadu berbasis pesantren, (3) sekolah berasrama Islami, dan (4) perguruan tinggi berbasis pondok pesantren. Integrasi ini mencerminkan upaya menjawab tantangan modernitas dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Jauh sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, masyarakat Nusantara telah mengenal dan menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai keislaman. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam di Indonesia yang kemudian melahirkan madrasah dan berbagai model sekolah berbasis Islam (Dhofier, 2011; Khoiruddin, 2022).

Perkembangan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Dari masa kerajaan Islam Nusantara, era kolonial Belanda, masa kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi setiap periode membawa dinamika tersendiri

yang membentuk wajah pendidikan Islam sebagaimana yang kita kenal saat ini. Tiga pilar utama pendidikan Islam Indonesia, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam, masing-masing memiliki sejarah, karakteristik, dan kontribusi yang unik (Nata, 2019; Haedari, 2021).

Dalam dekade terakhir, terjadi gelombang besar integrasi antara sistem pesantren dengan lembaga pendidikan formal, baik di tingkat sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi. Fenomena ini diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang secara eksplisit mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan umum. Hal ini membuka ruang bagi berbagai model integrasi yang inovatif sebagai respons terhadap tuntutan zaman (Madjid, 2021; Mujib & Mudzakkir, 2022).

Kajian ini bertujuan untuk: (1) menelusuri sejarah perkembangan pesantren, madrasah, dan sekolah di Indonesia; (2) menganalisis dinamika transformasi ketiga lembaga tersebut; dan (3) mengidentifikasi serta menganalisis model-model integrasi yang berkembang antara pesantren dengan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-deskriptif dan library research (studi kepustakaan). Sumber data primer meliputi regulasi dan kebijakan pendidikan, dokumen historis, dan laporan resmi Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber data sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data menggunakan content analysis dengan pendekatan historis-kritis untuk mengidentifikasi pola perkembangan dan model integrasi yang ada (Sugiyono, 2020; Creswell, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Historis Perkembangan Pesantren di Indonesia

a. Asal Usul dan Fase Awal Pesantren (Abad ke-15 hingga ke-17)

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai asal-usulnya. Sebagian berpendapat bahwa pesantren merupakan adopsi dari lembaga pendidikan Hindu-Buddha yang disebut 'mandala' atau 'asrama', yang kemudian diadaptasi sesuai nilai-nilai Islam (Dhofier, 2011). Pendapat lain menyatakan bahwa pesantren merupakan kreasi orisinal ulama Nusantara yang terinspirasi dari model pendidikan di Timur Tengah, khususnya Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra, 2019).

Tradisi pesantren diyakini telah ada sejak para Walisongo menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik, dan Sunan Bonang di Tuban dianggap sebagai pelopor berdirinya lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren. Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik), sebagai salah satu wali tertua, disebut-sebut sebagai pendiri pesantren pertama di Jawa (Haidar Putra Daulay, 2020). Di luar Jawa, pesantren juga berkembang di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan berbagai nama lokal seperti surau (Minangkabau) dan dayah (Aceh).

Pada fase ini, sistem pendidikan pesantren sangat sederhana. Seorang kiai (ulama) mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada santri yang tinggal di sekitar rumahnya. Kurikulum didominasi oleh ilmu-ilmu agama seperti fikih, tauhid, tasawuf, nahwu, dan sharaf dengan menggunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang kemudian dikenal sebagai 'kitab kuning' (Mas'ud, 2019).

b. Perkembangan Pesantren pada Masa Kolonial (Abad ke-18 hingga Awal Abad ke-20)

Masa kolonial Belanda membawa dinamika baru bagi perkembangan pesantren. Di satu sisi, kebijakan pendidikan kolonial (Politiek Etis, 1901) mendirikan sekolah-sekolah Belanda (HIS, MULO, HBS) yang mulai mempengaruhi preferensi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini justru memperkuat identitas pesantren sebagai benteng perlawanan kultural terhadap kolonialisasi (Azra, 2019; Nata, 2020).

Pada periode ini, pesantren mengalami perkembangan pesat. Para ulama yang menimba ilmu di Mekah dan Madinah membawa pemikiran-pemikiran baru yang memperbarui kurikulum dan metode pesantren. Tokoh-tokoh seperti Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi memberikan pengaruh besar terhadap jaringan ulama dan pesantren di Nusantara (Azra, 2019). Pesantren juga mulai berperan sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah, baik secara fisik maupun intelektual.

Perubahan signifikan terjadi di awal abad ke-20 ketika sejumlah pesantren mulai mengadopsi sistem madrasah dalam lingkungan pesantren. Pesantren Tebuireng di Jombang (didirikan KH. Hasyim Asy'ari, 1899) menjadi salah satu pelopor yang mengintegrasikan pelajaran umum ke dalam kurikulum pesantren. Demikian pula Pesantren Gontor di Ponorogo yang didirikan pada tahun 1926 mengembangkan sistem pendidikan modern yang memadukan tradisi pesantren dengan metode pengajaran kontemporer (Mastuhu, 2019).

c. Pesantren Pasca Kemerdekaan hingga Orde Baru (1945–1998)

Pasca kemerdekaan Indonesia (1945), pesantren menghadapi tantangan baru dalam mengintegrasikan diri dengan sistem pendidikan nasional. UU Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 12 Tahun 1954 belum memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan. Akibatnya, pesantren tetap berada di luar sistem pendidikan formal negara (Daulay, 2020).

Pada era Orde Baru di bawah Soeharto (1966–1998), hubungan antara negara dan pesantren mengalami pasang surut. Pemerintah sempat memandang pesantren dengan kecurigaan karena kaitannya dengan gerakan Islam politik. Namun seiring waktu, pemerintah mengakui peran strategis pesantren dan mulai mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan nasional melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 yang mengatur kesetaraan madrasah dan pesantren dengan sekolah umum (Haedari, 2021).

d. Pesantren di Era Reformasi dan Kontemporer (1998–Sekarang)

Era reformasi membawa perubahan paradigmatis bagi pesantren. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 merupakan tonggak penting yang mengakui pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pesantren mendapatkan ruang lebih luas untuk mengembangkan diri sesuai karakteristiknya (Mujib & Mudzakir, 2022).

Puncak pengakuan legal pesantren terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, kemandirian, dan kebebasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pesantren didefinisikan sebagai lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil 'alamin (Kemenag RI, 2019; Mujib, 2022).

Data Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 36.000 pesantren di Indonesia dengan lebih dari 4 juta santri. Pesantren telah bertransformasi menjadi berbagai tipologi: (1) pesantren salafiyah (tradisional) yang mempertahankan sistem pengajaran kitab kuning; (2) pesantren khalafiyah (modern) yang mengadopsi kurikulum dan metode pengajaran modern; dan (3) pesantren kombinasi yang memadukan keduanya. Pesantren juga

berkembang menjadi pusat ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kemenag RI, 2023; Wahid, 2021).

2. Historis Perkembangan Madrasah di Indonesia

a. Kelahiran Madrasah sebagai Modernisasi Pesantren

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia lahir dari proses modernisasi pendidikan pesantren. Kata 'madrasah' berasal dari bahasa Arab yang berarti 'tempat belajar'. Berbeda dengan pesantren yang bersifat informal dan nonklasikal, madrasah mengadopsi sistem kelas (klasikal), kurikulum terstruktur, dan jadwal pelajaran yang terorganisir karakteristik yang diadaptasi dari sistem pendidikan Barat (Azyumardi Azra, 2019; Nata, 2020).

Madrasah modern pertama di Indonesia umumnya didirikan oleh organisasi Islam dan tokoh pembaru Islam pada awal abad ke-20. Madrasah Adabiyah di Padang (1909) yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad dianggap sebagai madrasah modern pertama di Indonesia yang memadukan pelajaran agama dengan pelajaran umum menggunakan sistem klasikal. Disusul kemudian Sekolah Agama di Batusangkar (1910) dan Diniyah School di Padangpanjang (1915) yang merupakan madrasah khusus perempuan pertama di Asia Tenggara (Steenbrink, 2018; Daulay, 2020).

Organisasi-organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan Persatuan Islam/Persis (1923) berperan besar dalam mendirikan dan mengembangkan madrasah di seluruh Nusantara. Muhammadiyah mendirikan jaringan sekolah dan madrasah modern, sementara NU lebih banyak mengembangkan madrasah dalam lingkungan pesantren.

b. Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Setelah kemerdekaan, madrasah menghadapi dilema antara mengikuti standar pendidikan negara atau mempertahankan otonominya sebagai lembaga pendidikan Islam. Melalui SKB Tiga Menteri Tahun 1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri), madrasah mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional dengan keharusan memberikan porsi 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama (Haedari, 2021).

Langkah strategis terbesar dalam formalisasi madrasah terjadi melalui UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 yang menempatkan madrasah setara dengan sekolah umum. Kemudian UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 semakin memperkuat posisi madrasah dengan menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara SMA (Mujib & Mudzakkir, 2022; Daulay, 2020).

Saat ini, madrasah di Indonesia telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya kompetitif secara akademik, tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keagamaan yang kuat. Data Kemenag RI (2023) menunjukkan terdapat sekitar 82.000 madrasah (MI, MTs, MA) dengan total lebih dari 10 juta siswa. Fenomena 'madrasah unggulan' juga semakin berkembang, di mana madrasah negeri maupun swasta berhasil menorehkan prestasi akademik di tingkat nasional dan internasional (Kemenag RI, 2023).

3. Historis Perkembangan Sekolah Islam di Indonesia

a. Sekolah Islam di Era Kolonial dan Awal Kemerdekaan

Berbeda dengan pesantren dan madrasah yang murni berdiri dari tradisi Islam, 'sekolah Islam' atau 'sekolah berbasis Islam' lahir sebagai respons terhadap sistem persekolahan kolonial Belanda. Masyarakat Muslim menginginkan pendidikan umum yang tetap berlandaskan nilai-

nilai Islam. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah sejak 1912 yang menggunakan sistem persekolahan Barat namun dengan muatan Islam merupakan contoh paling awal dari sekolah Islam di Indonesia (Steenbrink, 2018).

Pada masa awal kemerdekaan, sekolah-sekolah Islam yang didirikan oleh berbagai organisasi Islam berkembang pesat. Mereka memodifikasi kurikulum sekolah umum dengan menambahkan pendidikan agama Islam, baik sebagai mata pelajaran wajib maupun sebagai pembentukan kultur sekolah yang Islami. Jenis sekolah ini tetap mengikuti standar Kementerian Pendidikan namun juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Nata, 2020).

b. Sekolah Islam Terpadu (SIT) sebagai Model Kontemporer

Fenomena Sekolah Islam Terpadu (SIT) muncul pada era 1990-an dan berkembang pesat pasca reformasi 1998. SIT merupakan model sekolah yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum (Kemendikbud) dengan kurikulum pendidikan Islam secara menyeluruh bukan hanya sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan sebagai paradigma pendidikan. Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang berdiri pada tahun 2003 menjadi wadah koordinasi sekolah-sekolah model ini (JSIT Indonesia, 2023).

SIT biasanya menerapkan konsep full day school, hafalan Al-Qur'an, integrasi nilai Islam dalam setiap mata pelajaran (Islamisasi pengetahuan), pembelajaran berbasis proyek, dan keterlibatan aktif orang tua. Pada 2023, JSIT Indonesia memiliki anggota lebih dari 3.000 sekolah (TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT) yang tersebar di seluruh Indonesia (JSIT, 2023; Islamiyah, 2022).

4. Model Integrasi Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi dengan Pesantren

a. Landasan Filosofis dan Regulasi Integrasi

Integrasi antara pesantren dengan lembaga pendidikan formal merupakan keniscayaan historis. Secara filosofis, integrasi ini mencerminkan upaya merekonsiliasi dikotomi 'ilmu agama' dan 'ilmu umum' yang telah lama menjadi perdebatan dalam pendidikan Islam. Ismail Raji al-Faruqi melalui konsep 'Islamisasi ilmu pengetahuan' (Islamization of Knowledge) telah memberikan landasan intelektual bagi upaya integrasi ini (al-Faruqi, 1982; Wan Daud, 2020).

Secara regulatif, integrasi ini didukung oleh beberapa regulasi penting: (1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang mengakui pendidikan keagamaan sebagai sub-sistem pendidikan nasional; (2) PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan pesantren; (3) UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 yang memberikan pengakuan penuh terhadap pesantren; dan (4) Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Kemenag RI, 2020).

b. Model Integrasi Madrasah/Sekolah dengan Pesantren

Model pertama adalah Madrasah/Sekolah Berasrama (Boarding School). Dalam model ini, madrasah atau sekolah menyelenggarakan program asrama yang mengadopsi tradisi pesantren (pengajian kitab kuning, tahfizh Al-Qur'an, pembinaan akhlak) di luar jam pelajaran formal. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia yang tersebar di berbagai provinsi merupakan contoh terbaik dari model ini menggabungkan standar akademik tinggi dengan pembinaan keislaman pesantren (Kemenag RI, 2022; Wahid, 2021).

Model kedua adalah Pesantren dengan Madrasah/Sekolah Formal di Dalamnya. Banyak pesantren besar mendirikan satuan pendidikan formal (MI, MTs, MA, atau SD, SMP, SMA) di dalam kompleks pesantren. Pesantren Tebuireng (Jombang), Pesantren Al-Anwar (Sarang, Rembang), dan Pesantren Modern Gontor (Ponorogo) merupakan contoh pesantren yang berhasil menyelenggarakan pendidikan formal berkualitas tinggi dalam bingkai tradisi kepesantrenan (Mastuhu, 2019; Zarkasyi, 2020).

Model ketiga adalah Madrasah Mu'adalah (Madrasah Setara). UU Pesantren 2019 membuka peluang bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan yang diakui setara dengan madrasah formal melalui mekanisme mu'adalah (penyetaraan). Kurikulum pesantren yang memenuhi standar tertentu dapat disetarakan dengan ijazah madrasah negeri, tanpa pesantren harus mengubah karakteristik pendidikannya secara mendasar (Kemenag RI, 2020; Mujib, 2022).

c. Model Integrasi Perguruan Tinggi dengan Pesantren

Model Ma'had Al-Jami'ah (Pesantren Kampus) merupakan model yang paling berkembang dalam integrasi perguruan tinggi dengan pesantren. Ma'had al-jami'ah adalah lembaga pesantren yang berada di dalam kampus perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Mahasiswa diwajibkan atau dianjurkan tinggal di ma'had selama minimal satu tahun pertama untuk mendapatkan pembinaan keislaman, tahsinul Qur'an, dan pembentukan karakter (Mujib & Mudzakkir, 2022).

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan pionir dalam penerapan model ma'had al-jami'ah secara sistematis. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan tinggal di ma'had selama satu tahun dan mengikuti program intensif bahasa Arab, tahsin Al-Qur'an, dan kajian Islam. Model ini kemudian diadopsi oleh hampir semua PTKIN dan sejumlah universitas umum di Indonesia (Suprayogo, 2020; Wahidmurni, 2022).

Model berikutnya adalah Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren (PTB). Sejumlah pesantren besar mendirikan perguruan tinggi di dalam kompleksnya baik perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) maupun perguruan tinggi umum. Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) di Pati, Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Genteng Banyuwangi, dan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang adalah beberapa contoh perguruan tinggi yang lahir dari rahim pesantren (LPDP & Kemenag, 2021).

Model Kemitraan Strategis Perguruan Tinggi Pesantren juga berkembang melalui program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) berbasis pesantren, program beasiswa santri berprestasi (PBSB), program dosen tamu dari ulama pesantren, dan kerjasama riset bersama. Program PBSB yang dikelola Kemenag telah berhasil mengirim ribuan santri berprestasi ke perguruan tinggi terkemuka baik dalam maupun luar negeri sejak 2004 (Kemenag RI, 2022).

d. Tantangan dan Prospek Integrasi

Meskipun model-model integrasi terus berkembang, beberapa tantangan masih dihadapi: (1) Perbedaan kultur antara pesantren (organik, informal, kiai-sentris) dengan sekolah/perguruan tinggi (birokratis, formal, sistem-sentris); (2) Ketegangan antara standarisasi nasional dengan otonomi pesantren; (3) Keterbatasan SDM pengajar yang memiliki kompetensi ganda (agama dan umum); dan (4) Kesenjangan kualitas antarpesantren yang sangat beragam (Wahid, 2021; Arifin, 2023).

Ke depan, integrasi pesantren dengan lembaga pendidikan formal memiliki prospek yang sangat cerah. Pengakuan legal melalui UU Pesantren 2019, dukungan anggaran melalui Dana Abadi Pesantren yang diamanatkan UU, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan terpadu menunjukkan bahwa model integrasi akan terus berkembang dan berinovasi (Mujib & Mudzakkir, 2022; Kemenag RI, 2023).

SIMPULAN

Perjalanan historis pesantren, madrasah, dan sekolah Islam di Indonesia mencerminkan dinamika adaptasi dan transformasi lembaga pendidikan Islam dalam merespons berbagai tantangan zaman. Pesantren sebagai lembaga tertua telah membuktikan ketangguhannya dalam bertahan dan berkembang selama berabad-abad, dari era Walisongo hingga era digital saat ini.

Madrasah lahir sebagai moderasi antara tradisi kepesantrenan dengan tuntutan modernitas pendidikan, sementara sekolah Islam khususnya SIT merupakan kreasi kontemporer yang mencoba mengintegrasikan nilai Islam secara holistik dalam sistem persekolahan modern.

Model integrasi antara pesantren dengan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi terus berkembang dengan berbagai inovasi. Model *ma'had al-jami'ah*, boarding school berbasis pesantren, madrasah mu'adalah, dan perguruan tinggi berbasis pesantren merupakan bukti nyata bahwa dikotomi 'pendidikan agama' versus 'pendidikan umum' semakin cair dan dapat disintesiskan. Lahirnya UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 menjadi momentum bersejarah yang memberikan pengakuan legal dan dukungan struktural bagi pengembangan pesantren dan model-model integrasinya.

Kajian ini merekomendasikan perlunya: (1) penguatan kebijakan yang mendukung berbagai model integrasi; (2) pengembangan kurikulum terpadu yang mensinergikan ilmu agama dan ilmu umum; (3) peningkatan kompetensi SDM pendidik yang memiliki kompetensi ganda; (4) penguatan riset dan evaluasi terhadap berbagai model integrasi yang ada; dan (5) perluasan kemitraan antara pesantren dengan institusi pendidikan dan dunia kerja.

REFERENSI

- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Arifin, Z. (2023). Dinamika Integrasi Pendidikan Pesantren dan Perguruan Tinggi di Era Disrupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–68. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.121.45-68>
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Daulay, H. P. (2020). *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah (Edisi Baru)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: LP3ES.
- Haedari, M. A. (2021). *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern (Cetakan ke-3)*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Islamiyah, N. (2022). Sekolah Islam Terpadu: Genealogi, Karakteristik, dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 17(2), 123–145.
- JSIT Indonesia. (2023). *Data dan Profil Sekolah Islam Terpadu*. Jakarta: Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia.
- Khoiruddin, M. (2022). Transformasi Kelembagaan Pesantren Menuju Tata Kelola Modern. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.21831/mpi.v10i1.45321>
- Madjid, N. (2021). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Edisi Khusus 50 Tahun)*. Jakarta: Paramadina.
- Mas'ud, A. (2019). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mastuhu. (2019). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Cetakan Ulang)*. Jakarta: INIS.
- Mujib, A., & Mudzakir, J. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata, A. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam (Edisi Kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nata, A. (2020). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Edisi ke-6). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Steenbrink, K. A. (2018). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Terjemahan, Cetakan ke-5). Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, I. (2020). *Universitas Islam Unggul: Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformasi Sistem Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Wahid, A. (2021). *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Wahidmurni. (2022). Model Pengembangan Ma'had Al-Jami'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 56–74.
- Wan Daud, W. M. N. (2020). *Islamization of Contemporary Knowledge and the Role of the University*. Kuala Lumpur: UTM Press.
- Zarkasyi, A. S. (2020). *Gontor dan Pembaruan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Statistik Pendidikan Islam 2021/2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Data Pesantren dan Santri Nasional 2022–2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.
- LPDP & Kementerian Agama. (2021). *Program Dana Abadi Pesantren: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: LPDP-Kemenag RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.